



JURNAL ILMIAH AKUNTANSI

Volume 3 - Nomor 2, Juli 2015

Pengaruh Persentase Perubahan Return on Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap KAP Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2013).
(Rumyati dan Holiawati)

Universitas Pamulang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

(Khayatun Nufus)

Universitas Pamulang

Pengaruh Kualitas Software Akuntansi dan Kualitas Informasi terhadap Kinerja Individu Melalui Kepuasan Pengguna Akhir.

(Endang Ruhayat)

Universitas Pamulang

Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham dengan Kinerja Pasar (IHSG) di Bursa Efek Indonesia.

(Eka Kusuma Dewi)

Universitas Pamulang

Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Rentabilitas pada PT Ades Waters Indonesia Tbk. Jakarta Selama Periode 2002-2009.

(Irwan Setiawan)

Universitas Pamulang

Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance).

(Radian dan Nofryanti)

Universitas Pamulang

Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor dan Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan Studi Kasus : Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan

(Sugiarto dan Sugiyanto)

Universitas Pamulang



**EDITORIAL STAFF
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG**

**Pelindung
Rektor Universitas Pamulang**

**Penasehat:
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pamulang
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Pamulang**

**Penanggung Jawab
Endang Ruhiyat**

**Pemimpin Redaksi
Iin Rosini**

**Dewan Redaksi:
Holiawati
Sugiyanto
Yusar Sagara
Ferry Irawan**

**Redaksi Pelaksana:
Nofryanti
Wiwit Irawati**

**Sekretariat:
Khaerul Umam
Sutini
Guntur Darmawan
Hatim Syayidah Aslami
Saidatusolihah**

ISSN 2339-0867

**Alamat Redaksi
Gedung A lantai 2 Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1 Pamulang
Barat-Tangerang, Banten. Telp./Fax.(021) 741 2566**

DAFTAR ISI
JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN 2339-0867

Volume 3 - Nomor 2, Juli 2015

Halaman

Pengaruh Persentase Perubahan <i>Return on Asset</i> (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap KAP <i>Switching</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor <i>Property dan Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2013)	692
Rumyati dan Holiawati Universitas Pamulang	
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	711
Khayatun Nufus Universitas Pamulang	
Pengaruh Kualitas Software Akuntansi dan Kualitas Informasi terhadap Kinerja Individu Melalui Kepuasan Pengguna Akhir.	727
Endang Ruhiyat Universitas Pamulang	
Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham dengan Kinerja Pasar (IHSG) di Bursa Efek Indonesia	751
Eka Kusuma Dewi Universitas Pamulang	
Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Rentabilitas pada PT Ades Waters Indonesia Tbk. Jakarta Selama Periode 2002-2009	767
Irwan Setiawan Universitas Pamulang	
Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	782
Radian dan Nofryanti Universitas Pamulang	

817

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

KHAYATUN NUFUS

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Banten

ABSTRACT

The necessity and demands transparency of financial performance illustrates the importance of local government accounting standards applied so that there will be uniformity of assessment of the performance of local governments. The Government Accounting Standards (SAP) is the accounting principles applied No.8 of 2006 on Financial Reporting and Performance of Government Agencies. As for uniformity in preparing and presenting the financial statements of the government for the whole of local government in the region of Indonesia, referring Government Accounting Standards. Thus, SAP is a necessity that has the force of law in an effort to improve the quality of financial reporting in the Indonesian government. The general objective of financial statements is to provide information about the financial position, the realization of the budget, cash flow and financial performance reporting entities that are beneficial for the users. The financial report is a medium for an entity in this government to account for its financial performance to the public. The government should be able to present a financial report containing financial information quality. In the Government Accounting Standards (SAP) explained that the quality of financial statements that meet the characteristics; Relevant, Reliable, can be compared, and understandably. These test results provide empirical evidence that the government's application of accounting standards partially influence on the quality of government financial reports.

Key word: *SAP, Quality of Government Financial Statements*

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan dalam penyelenggaraan keuangan makin marak terjadi di berbagai instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia membuat aturan yang akan dijadikan acuan bagi penyelenggaraan keuangan yang benar. Pemerintah Indonesia bertekad untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih melalui penyelenggaraan keuangannya, dan dibuktikan dengan

dikeluarkannya UNDANG-UNDANG 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA. Undang-undang tersebut merupakan wujud reformasi di bidang manajemen keuangan negara, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambanya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Disamping Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi jika pemerintah daerah dapat mampu mengelola potensi daerahnya melalui pengelolaan potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah.

Keharusan dan tuntutan transparansi kinerja keuangan daerah memberikan gambaran pentingnya Standar akuntansi pemerintah diberlakukan sehingga akan ada keseragaman penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah juga membutuhkan kesungguhan dan komitmen para aparat dalam pemerintahan yang bersangkutan sebagai pelaku dan penyusun laporan keuangan pemerintah daerah bagi yang memerlukan atau pihak yang berkepentingan.

Dalam pelaksanaan PP 24 Tahun 2005 tersebut, hingga Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2008 selesai diaudit di tahun 2009, ternyata opini yang didapat pemerintah saat itu masih menyedihkan. Untuk itulah, Pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, dan disepakati bahwa basis akrual akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2014.

Dengan upaya pemerintah tersebut, ternyata fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Berdasarkan hasil laporan

Badan Pemeriksa Keuangan selama lima tahun berturut-turut (2004-2008) memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP/Disclaimer) terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal ini menunjukkan adanya indikasi yang menyebutkan banyaknya laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang tersebar di wilayah Indonesia, masih banyak yang tidak memenuhi Standar akuntansi yang benar.

Kondisi yang semakin memburuk ini sangat memprihatinkan mengingat dana yang dikelola pemerintah merupakan dana masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat juga.

Seperti yang di Jelaskan oleh Ketua BPK, R Hadi Poernomo bahwa pada Semester I tahun 2010 melakukan pemeriksaan pada 528 objek, yang terdiri atas 437 objek pemeriksaan keuangan, tujuh objek pemeriksaan kinerja dan 84 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dari 528 objek pemeriksaan, BPK menemukan 10.113 kasus senilai Rp26,12 triliun. Terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.289 kasus dengan nilai Rp9,55 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp93,01 miliar telah ditindaklanjuti oleh auditee dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan BUMN, dan Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk menyeragamkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah bagi seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia, menggunakan acuan Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan keharusan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti ***Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .***

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

“Seberapa besar pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran dan fakta empiris mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah serta mengkaji dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah Daerah,serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Kota Baubau.

1.3.2 Tujuan dalam penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan pengembangan Ilmu

Bagi Dunia Akademisi

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar penguatan bahwa pengelolaan keuangan dari aparat pemerintahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah, guna memenuhi kriteria penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas
- 2) Hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pembuktian bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat mendorong aparat pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta memberikan pengalaman penelitian dibidang pemerintahan, memberikan gambaran tentang aparat pemerintahan dengan segala aspek yang melekat pada aparat tersebut untuk menunjang kinerja terutama di bidang keuangan dan kemampuan dalam menerapkan standar akuntansi keuangan pemerintahan.
- 2) Peneliti lebih memahami penerapan standar akuntansi pemerintah, melalui peningkatan kualitas aparat, struktur pemerintahan,serta faktor politik sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah akan lebih tepat sesuai dengan standar yang ada.

Bagi peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberi referensi dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya tentang pengelolaan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya

1.4.2 Pemecahan Masalah

- a) Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah masih banyak yang belum memenuhi standar. Artinya bahwa kinerja keuangan instansi di lingkungan pemerintah daerah belum memuaskan. Yang menjadi salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerahnya untuk membuat laporan keuangan masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pada

- instansinya, yang berakibat pada pelaporan secara keseluruhan bagi keuangan di tingkat pemerintah kota.
- b) Untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas, sudah seharusnya setiap pemerintah daerah mempersiapkannya dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia pada bidang akuntansi.
 - c) Karena Standar Akuntansi Pemerintah didefinisikan sebagai prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
 - d) Pengelolaan Keuangan diukur dari penyusunan dan pemahaman para aparat pemerintah untuk dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Akuntansi Pemerintah

Menurut Muindro (2010 : 29) Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang berkaitan dengan anggaran negara. Akuntansi pemerintahan dilaksanakan baik oleh unit-unit pemerintah (Eksekutif) dan juga oleh lembaga Legislatif dan Yudikatif sepanjang membebani anggaran negara. Akuntansi pemerintahan mencatat dan melaporkan transaksi kegiatan anggaran negara berupa : Pendapatan (*revenues*) dan Belanja (*expenditures*), Pembiayaan (*financing*) , biasanya disebut Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*).

Akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan. Akuntansi pemerintahan termasuk akuntansi mikro yang mempunyai tujuan umum untuk mensejahterakan rakyat. (<http://id.wikipedia.org> dan Buku akuntansi pemerintahan, 03 November 2010) .

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi keuangan sektor publik di atur dalam PSAK No.45, yang mengatur tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba, laporan keuangan yang dihasilkan, unsur-unsur laporan keuangan, dan standar akuntansi pemerintah.

Pada tahun 2005 Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah paragraf 5 menyebutkan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sama seperti yang didefinisikan oleh Indra Bastian (2010 ; 138), dalam bukunya yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan definisi “

Standar Akuntansi Pemerintah : Adalah konsep-konsep akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah paragraf 8 menyebutkan bahwa Komite Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Muindro (2010 :89) menjelaskan bahwa tujuan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat adalah : (a) Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar, praktek, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pelaksanaan anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, instansi dan lembaga yang secara nasional berguna sebagai dasar penilaian kinerja, menentukan kegiatan otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas, (c) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah pusat dan instansi/lembaga secara keseluruhan dan (d) Menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien dan efektif.

Deddi, dkk (2012 : 7) berpendapat bahwa penerapan akuntansi pemerintahan memiliki ciri-ciri : (a) Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, (b) Tidak ada pengungkapan laba, (c) Tidak ada pengungkapan kepemilikan dan (d) Penggunaan akuntansi dana

Dengan pernyataan yang sama oleh Deddi,dkk (2012 : 8), berpendapat bahwa ada tiga tujuan pokok penerapan akuntansi pemerintah, yaitu :

- a) Pertanggungjawaban : memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan.

Fungsi pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa :

- Akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan.
- Akuntansi pemerintahan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya yang ada.

- b) Manajerial, menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

- c) Pengawasan, memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi pemerintah (PSAP) no. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 13 menyatakan “tanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan berada pada pimpinan entitas”. Dalam lingkup pemerintahan, yang dimaksud dengan entitas adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai entitas pelaporan.

Menurut Deddi Nordiawan,dkk (2012:305) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna .Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah seperti yang ditulis Muhammad Surachman (2009 : 10-11) adalah : untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dengan : (a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, (b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah, (c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, penggunaan sumber daya ekonomi, (d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya, (e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, (f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan (g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Laporan keuangan pokok yang disusun pemerintah daerah sesuai dengan PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Dalam PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) paragraf 16 menyebutkan : Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada : (a) Masyarakat, (b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, (d) Pemerintah.

Dalam paragraf berikutnya disebutkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Tertuang dalam PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) paragraf 19 menyebutkan : entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari : (1) Pemerintah pusat, (2) Pemerintah daerah dan (3) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.1.3 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Abdul Hafiz dalam bukunya (2012 : 13) menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut adalah:

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, serta memprediksi masa depan.

Informasi yang relevan adalah informasi yang :

- Memiliki manfaat umpan balik
- Memiliki manfaat prediktif
- Tepat waktu
- Lengkap

b. Andal

Artinya informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian jujur
- Dapat diverifikasi
- Netralitas

c. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. (Purnawati,2008) .

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2005:134) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik tersebut meliputi : (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; dan (4) Dapat dipahami.

Kesesuaian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah baru akan terwujud jika dikerjakan oleh aparat yang memiliki kualitas dan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan instansinya. laporan keuangan yang disusun baru dikatakan berkualitas laporan keuangan yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami bagi penggunaanya.

Bambang (2011) memberi kesimpulan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkannya.

Imam Bastari (2010) juga memberikan kesimpulan pada makalahnya bahwa penerapan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan harus dilaksanakan dengan melalui kinerja keuangan yang baik dan untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini mengungkapkan bahwa hanya melalui kinerja keuangan yang baik, maka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat terlaksana, dan dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan maka kualitas laporan keuangan akan lebih baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan dalam penerapan Standar Akuntansi pada instansi pemerintahan dicerminkan melalui kinerja keuangan pada masing-masing instansi di pemerintahan tersebut.

- a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dicerminkan melalui indikator : kesesuaian tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, dan prinsip akuntansi.

- b. Kualitas Laporan Keuangan : laporan keuangan dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas jika memenuhi kriteria :relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami

2.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- $H_0 : \rho_{XY} = 0$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- $H_1 : \rho_{XY} \neq 0$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif (*verificative research*) dan bersifat penjelas (*explanatory research*), yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan menjelaskan hubungan kausalitas antara berbagai variabel melalui pengujian hipotesis (Sekaran, 2003).

Penelitian ini juga sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Nazir (2005 : 55) adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menjelaskan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2009:80) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kota Baubau yang berjumlah 30 SKPD.. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan korelasi Person Product Moment, koefisien determinasi.

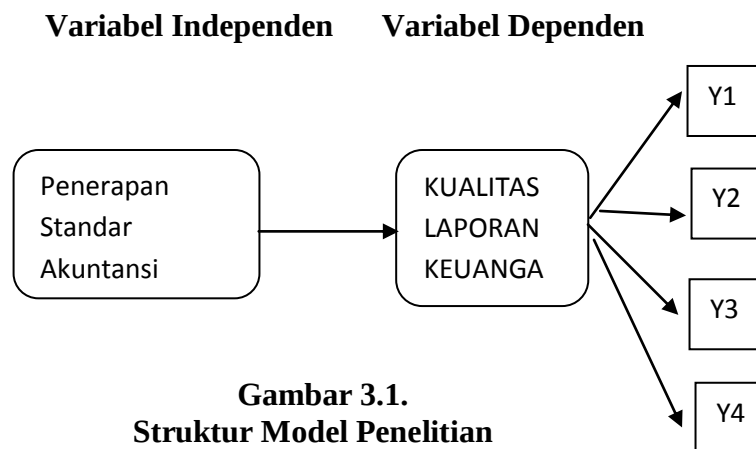
3.1 Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Berdasarkan perumusan dan tujuan penelitian, maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel terikat atau Dependent Variable (variabel Y) adalah Variabel Kualitas Laporan Keuangan
2. Variabel Bebas atau Independent Variabel, adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

3.1.2 Struktur Model Penelitian



Gambar 3.1.
Struktur Model Penelitian

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2009: 215) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi.

Dalam penelitian ini populasi nya merupakan semua unit analisis yang jumlah dan sasarannya sudah jelas, yaitu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bau-bau yang berjumlah 32. Unit observasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kota Bau-bau yang berjumlah 60 orang.

3.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono : 244)

Teknik analisa data merupakan teknik yang digunakan dalam rangka menjawab perumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan

4. ANALISIS DATA

4.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Baubau yang terbilang tidak muda lagi dalam usia pemerintahannya menjelang ke 12 tahun. Berbagai program kegiatan dikembangkan di seluruh sektor. Termasuk di antaranya adalah pembenahan dari aparat pemerintahannya. Salah satu cerminan keberhasilan pemerintahan dalam pengembangan di segalasektor bisa kita lihat dari laporan

keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang handal, akuntabel dan dapat diyakini kewajarannya, Pemerintah Kota Baubau menggandeng Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meraih opini WTP atas LKPD tahun 2012.

4.2 Analisis Data

Penggunaan analisi jalur dalam analisis data penelitian didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 297-298) :

1. Hubungan antar variabel yang akan dianalisis berbentuk linier, aditif dan kausal.
2. Variabel-variabel residual tidak berkorelasi dengan variabel yang mendahuluinya, dan tidak juga berkorelasi dengan variabel yang lain.
4. Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur kausal/sebab –akibat searah.

Berdasarkan alasan di atas untuk dapat melakukan analisis dengan analisis jalur untuk pengolahan data yang diperoleh dari responden. Dari kuisioner yang dibagikan penulis kepada 30 SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Bau-bau, yang kembali .60 exemplar.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis jalur adalah sebagai berikut :

4.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dihipotesiskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

- $H_0 : \rho_{ZY} = 0$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
- $H_1 : \rho_{ZY} \neq 0$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Tabel 4.8
Hasil Uji penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

Koef. Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	H_0	H_a
0,4191	4,7862	2,005	ditolak	diterima

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4. diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} variabelpenerapan standar akuntansi pemerintah (4,7862) lebih besar dari t_{tabel}

(2,005). Karena t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel} , maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- Pengaruh langsung Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar $(P_{yx_2})^2 = (0,4191) \times (0,4191) = 0,18(18\%)$
- Pengaruh tidak langsung Penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan karena hubungannya dengan kompetensi = $P_{zy} \times r_{yx_1} \times P_{x_1} = (0,4191) \times (0,3795) \times (0,3648) = 0,058(5,8\%)$.
- Pengaruh tidak langsung Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan hubungannya dengan komitmen = $P_{zy} \times r_{yx_2} \times P_{x_2} = (0,4191) \times (0,3648) \times (0,2404) = 0,037(3,7\%)$.
- Pengaruh tidak langsung Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan hubungannya dengan Politik : $P_{zy} \times r_{yx_3} \times P_{x_3} = (0,4191) \times (0,2383) \times (0,2738) = 0,027(2,7\%)$

Secara langsung penerapan standar akuntansi pemerintah memberikan pengaruh sebesar 18% terhadap kualitas laporan keuangan, dan secara tidak langsung karena keterkaitannya dengan kompetensi member pengaruh sebesar 5,8%, karena keterkaitannya dengan komitmen mempengaruhi sebesar 3,7%, dan keterkaitannya dengan politik, mempengaruhi sebesar 2,7%. Jadi secara total kontribusi (pengaruh) penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 30,2%.

5. KESIMPULAN

Besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- Pengaruh langsung Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar **18%**
- Pengaruh tidak langsung Penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan karena hubungannya dengan kompetensi **5,8%**.
- Pengaruh tidak langsung Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan hubungannya dengan komitmen sebesar **3,7%**.
- Pengaruh tidak langsung Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan hubungannya dengan Politik **2,7%**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Abdulkadir Madawaki, 2012, *Adoption of International Financial reporting Standards n Development Countries : The Case if Nigeria*” International Journal of Business and Management, volume 7, No.3 February 2012.
- Adli Anwar, 2012, “ *Pengaruh Komitmen Organisasional Dan Pengetahuan Manajer Terhadap keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan* (Survei Pada BUMN di Indonesia)” Penelitian.
- Arif Ardi Kusumah, “ *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (survey pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya)
- Abdul Halim (2007). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Hafiz Tanjung, 2008, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*,
- Azhar, 2010, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintahan”
- Akhmad Solikin, 2006. "Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 2, November.
- Agus Sartono. 2001. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Azhar Susanto, Prof. Dr. M. Bus, Ak. 2009. *Sistem informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangannya*, Edisi 3. Bandung: Lingga Jaya.
- Bambang Pamungkas, 2012, “Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Jurnal Ilmiah RANGGAGADING*, Volume 12 N0.1, April 1-10
- Dwi Cahyadi, 2009, : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, dan Posisi di Pemerintahan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah”.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 (Audited)*.
- Etty Murwaningsari. 2008. The Role of Organizational Commitment and Procedural Justice in Moderating the Relationship Between Budgetary Participation and Managerial Performance. *Gadjah Mada International Journal of Business*. 10(2): 185-210.
- Fraser, L.M., and Ormiston, A. 1998. *Understanding Financial Statement*. Fifth Edition. USA: Prentice Hall International inc.
- Gelderman, M. 1998. The Relation Between User Satisfaction, Usage of Information Systems and Performance. *Information & Management*. 34: 11-18
- Firma Sulistiyowati, 2003. “Peran Fraud Auditor dalam Mendeteksi Fraud untuk Mewujudkan Tata kelola yang baik dan Good Corporate Governance

- diIndonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 4, No.01 Edisi Februari.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik FE UGM Yogyakarta, Edisi Pertama.
- Gibson, J.L., Invincevich, J.M., and Donnelly, J.M. 1994. *Organization Behavior: Structure and Process*. Seventh Edition,
- Hair, F., Joseph, R.E., Anderson, Ronal, L.T., and William C.B. 2010. *Multivariat Data Analysis*. 9th Edition. Prentice Hall International Inc.
- Harun Al Rasyid, 1994, *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran
- Imam Ghazali, Prof.Dr,MCom, Akt, 2007,” *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ikin Sodikin ,2008,: “ Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi, Dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Good Government Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan”
- Irvan Permana, 2011,”Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung.
- IFAC, 2000; GASB, 1999
- Jamason Sinaga,” Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan “
- _____, “Jurnal Korolari Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Joko Supriyanton, ” Standar Akuntansi Pemerintahan”
- James L. Chan and Qi Zhang “Government Accounting Standard And Policies
- James, L.CHAN and XU Yunxiao :” Setting Government Accounting Standards : A comparative Institutional Analysis Of China and The United States.
- KSAP, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah
- Noordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati., 200
7. *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2012. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005.
- Narumondang Bulan Siregar, 2008 :” *Pengaruh Luas Daerah, pendidikan, Pengalaman, Pelatihan Formal Akuntansi, Dan kinerja Keuangan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Di Propinsi Sumatera Utara*” *Jurnal Akuntansi* 2008
- Nunuy Nur Afiah, Dr,Hj,SE,M.Si,Ak;:2010,” *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*” Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh, 2008 :” *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*”. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1 Vol. 13, April 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Badan
- Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

- Robbi Adhilni. 2007. *Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Pada Satuan Kerja Di Departemen Agama RI*. Jakarta. Birokrasi Publik di Indonesia, Gava Media, Edisi Pertama, pp. 20 – 26.
- Simanjuntak, Binsar H. 2005. “Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 1, No. 1, Mei.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Urip Santoso, 2008, : “*Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*”.
- Yujana, Lalu Hendri., 1999. *Akuntansi Pemerintahan* Edisi Kedua Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Yunwei Tang ; 2000: “ *Bumpy Road Leading to Internationalization : Review Of Accounting Development In China* “
- Siaran Pers BPK-RI, tanggal 15 Oktober 2008.**
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method for Business: A SKil Building Approach*. Fourth Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sugiyono. 2004. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Supramoko. 2000. *Keuangan Negara*. Edisi 5. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Permendagri Nomor 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- (<http://id.wikipedia.org> dan Buku akuntansi pemerintahan, 03 November 2010) .**
- (<http://wikipedia.org>& Buku Akuntansi Pemerintahan, 03 November 2010)
- (<http://www.gudangmateri.com/2011/04>)